

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Juwana**

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ke depan tercantum dalam Tabel V.1 di bawah ini.

**Tabel V.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Visi : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik</b>                            |  |   |  |
| <b>Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.</b>                 |  |   |  |
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>  |
| Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban | Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Revitalisasi peran dan fungsi poskamling.  |
|   |  |   | Pemberdayaan dan penguatan peran Linmas.   |
| <b>Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan</b>           |  |   |  |
| Tujuan  | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan   |
| Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan     | Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan            | Optimalisasi peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan Masyarakat Desa                  | Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa   |
|   | Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat                           | Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan                                  | Optimalisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan. |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan                        | Pelibatan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah        | Optimalisasi usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten    |
| <b>Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik</b>                  |  |  |  |
| Tujuan  | Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan   |
| Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan     | Optimalisasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Peningkatan pelayanan perijinan tepat waktu                          |
|   |  | Peningkatan penataan administrasi kependudukan                   | Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu          |
|   | Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan | Pengembangan data/Informasi                                      | Optimalisasi keterisian data monografi dan profil kecamatan          |
|   | Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa                                  | Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa   | Optimalisasi desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib |